

KESIMPULAN

Turki merupakan negara yang memiliki dinamika yang menarik untuk dibahas baik pembahasan mengenai dinamika sistem pemerintahannya sejak pendudukan Romawi hingga pembahasan mengenai perjalanan usaha Turki sebagai negara diantara dua benua yang ingin menjadi negara anggota Uni Eropa. Era modern Turki dimulai pasca terpilihnya Mustafa Kemal Attaturk sebagai penguasa Turki yang berhasil mengubah Turki dari negara dengan sistem kekhilafahan menjadi negara sekuler. Fokus Turki pada saat menjadi negara kekhilafahan tentunya diarahkan pada terciptanya hubungan yang erat dengan negara-negara Timur Tengah sebagai wilayah dimana sebagian besar wilayah negara Turki berada. Namun pada era Mustafa Kemal Attaturk, focus Turki dialihkan ke Barat khususnya Eropa yang menginspirasi tokoh yang diberi gelar sebagai Bapak Turki tersebut untuk menegakkan sekulerisme di negara Turki. Mustafa Kemal Attaturk melihat adanya keberhasilan negara-negara Eropa khususnya Eropa Barat untuk menjadi maju karena adanya pemisahan agama dengan pemerintahan, dimana hal tersebut pula yang berhasil melepaskan Eropa dari *Dark Age*. Mustafa Kemal Attaturk beranggapan bahwa hal yang sama dapat terjari pada Turki yang sebelumnya menjadi negara Islamis akan menjadi maju apabila menerapkan hal serupa dengan Eropa.

Tidak hanya berkiblat pada nilai-nilai yang dianut oleh Eropa untuk menjadi negara yang maju, pemimpin-pemimpin Turki pasca Mustafa Kemal Attaturk membawa Turki lebih dekat dengan Eropa yaitu ketika Eropa mencapai kegemilangannya dengan akhirnya mengupayakan regionalisasi wilayah dengan cara membentuk komunitas. Adanya keberhasilan Eropa pada saat itu menarik Turki untuk turut terlibat dalam berbagai kerjasama mulai dari kerjasama ekonomi dalam EEC setelah bergabungnya negara tersebut dalam NATO. Bergabungnya Turki tersebut berhasil membuahkan hasil berupa *custom union* yang memudahkan

Turki untuk dapat menjalin kerjasama lebih jauh dengan negara-negara Eropa dalam hal perdagangan.

Menjadi negara non Uni Eropa yang telah menjalin kerjasama dengan institusi regional tersebut membuat Turki menginginkan lebih dari sekedar itu selain dengan adanya kerjasama yang telah dibangun juga karena sebagian kecil dari wilayah Turki termasuk ke dalam benua Eropa. Dengan adanya ketentuan dimana semua negara yang termasuk dalam benua Eropa diperbolehkan untuk mengajukan proposal keanggotaan penuh maka Turki pada tahun 1989 untuk pertama kalinya melakukan hal tersebut.

Dalam usahanya untuk dapat menjadi negara anggota Uni Eropa secara penuh, Turki melakukan banyak perubahan dalam negaranya untuk menyesuaikan diri dengan *Copenhagen Criteria* dan *acquis* Uni Eropa yang tercantum dalam 35 bab negosiasi akses sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap negara kandidat. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Turki dimulai dengan adanya *harmonization packages* pada tahun 2001 yang mana dilakukan berkali-kali amandemen dalam Undang-Undang negara tersebut. Tidak hanya perubahan-perubahan yang dilakukan tetapi juga menyepakati berbagai kerjasama dengan Uni Eropa yang salah satu kerjasama kontroversial antara keduanya yaitu kerjasama penanggulangan arus pengungsi.

Internal Turki sejak awal sebelum negara tersebut merdeka diwarnai dengan kudeta-kudeta untuk menggulingkan pemimpin yang sedang berkuasa. Kudeta terbaru yang terjadi di Turki adalah kudeta yang dilakukan oleh militer Turki pada tanggal 16 Juli 2016 yang berhasil digagalkan oleh Presiden Erdogan. Adanya kudeta tersebut menimbulkan reaksi dari pemerintah berupa pemecatan, pemenjaraan, dan penutupan beberapa stasiun TV hingga terdapat wacana pemberlakuan kembali hukuman mati dengan tujuan menyelamatkan stabilitas negara dari orang-orang yang diduga sebagai pelaku

kudeta. Tidak berhenti sampai disitu, kelanjutan dari kudeta tersebut melahirkan adanya referendum sistem pemerintahan Turki yaitu dari parlementer menjadi presidensial yang telah disetujui dengan selisih suara yang sangat tipis. Baik upaya pembersihan pelaku kudeta dan juga referendum menghadirkan respon-respon negative dari dunia internasional khususnya Uni Eropa. Beberapa negara anggota Uni Eropa mengusulkan untuk membekukan bahkan memberhentikan proses aksesi Turki. Hal itu pula disampaikan oleh Presiden *European Parliament* dan juga Presiden *European Commission* dengan alasan apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki sangat bertentangan dengan *acquis*.

Sebelum adanya kudeta tersebut, proses aksesi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa berjalan lancar yaitu dengan adanya pertemuan tingkat tinggi di bulan Desember 2015 untuk membahas kelanjutan pembukaan bab negosiasi dan juga membahas mengenai liberalisasi visa. Setelah itu terdapat pertemuan penting lainnya pada bulan Maret 2016 untuk membahas mengenai kesepakatan pengungsi dengan Turki yang mengajukan syarat agar bab negosiasi lainnya segera dibuka dan juga proses liberalisasi visa dipercepat yang kemudian disepakati oleh Uni Eropa.

Berbeda dengan sikap Turki sebelumnya yang condong *yielding* yaitu dengan banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap *acquis* Uni Eropa dan juga menyepakati berbagai kerjasama terutama kerjasama untuk membantu Uni Eropa menanggulangi arus pengungsi. Namun pada tahun 2016 tepatnya pasca kudeta militer, sikap Turki berubah dengan tidak melakukan apa yang diminta oleh Uni Eropa terutama untuk menghentikan hal-hal yang dinilai Uni Eropa sebagai pelanggaran nilai-nilai *acquis*. Progres aksesi Turki dinilai lamban terutama pasca kudeta hingga akhir tahun 2017 yang kemudian didukung dengan pernyataan Presiden Erdogan dan beberapa pihak lainnya dari Turki terkait Turki yang tidak ingin terus memohon pada Uni Eropa dan

mengatakan bahwa Turki bisa saja tidak mempedulikan lagi kesepakatan pengungsi.

Dengan adanya proses negosiasi yang menjadi tidak sesuai harapan, Turki memandang bahwa alternative terbaik yang bisa dilakukan oleh Turki (BATNA) dalam negosiasi aksesinya tersebut adalah dengan cara *inaction*. Karena jika Turki melanjutkan perundingan maka Turki akan terus dimanfaatkan oleh Uni Eropa tetapi tidak memberikan jawaban yang pasti akan menerima Turki atau tidak. Tetapi jika Turki memutuskan untuk keluar dari perundingan maka itu akan merugikan Turki karena Uni Eropa merupakan mitra utama Turki dalam hal perekonomian dan tujuan Turki di wilayah Barat selama ini. Sehingga *inaction* menjadi alternative yang dipilih oleh Turki yang juga memandang negaranya sebagai negara dengan posisi strategis yang dibutuhkan oleh Eropa terutama sebagai negara yang menyelamatkan Turki dari permasalahan terkrusial yang sedang dialami oleh Uni Eropa yaitu permasalahan pengungsi. Turki telah membantu Uni Eropa dari permasalahan yang mengganggu stabilitas negarane-negara anggotanya baik ekonomi, sosial maupun politik. Dengan adanya posisi strategis tersebut meningkatkan *bargaining position* Turki dalam meja negosiasi sehingga Turki yang mengambil sikap *inaction* diharapkan dapat memotivasi pihak Uni Eropa untuk mempertimbangkan Turki sebagai negara anggota dan menjadi prospek yang lebih baik dari sebelumnya bagi masa depan aksesinya Turki.